

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radar Semarang	Republika	Kompas	Koran Tempo

Wilayah: Kabupaten Temanggung

Halaman 6

RSUD Siap Pinjam Bank

Tunggakan BPJS Capai Rp 36 Miliar

TEMANGGUNG, *Radars* *Kedu*-Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Temanggung kini mengalami kesulitan. Hal tersebut terjadi karena tunggakan klaim pembayaran dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sampai saat ini masih belum dibayarkan.

Direktur RSUD Temanggung Artiyono mengatakan, sampai Agustus 2019, tunggakan BPJS yang belum dibayar mencapai Rp 36 miliar. "Dari awal tahun, tunggakan yang sudah dibayar baru bulan

Januari sampai Maret, sementara bulan April sampai Juli yakni selama empat bulan itu masih belum dibayar," ucapnya pada Jawa Pos Radar Kedu, Rabu (28/8).

Menurutnya, setiap bulan BPJS Kesehatan membayar tagihan klaim kepada RSUD Temanggung sekitar Rp 8,5 miliar sampai Rp 9 miliar. Dengan besarnya tunggakan yang masih belum dibayarkan, maka hal tersebut tentu berdampak pada roda kerja RSUD Temanggung.

Jika sampai September tunggakan tersebut belum dibayar, maka RSUD Temanggung bersiap mencari pinjaman ke bank. "Kami sudah sampaikan kepada Pemkab, uang pinjaman itu

nantinya akan kita gunakan untuk membayar karyawan. Sedangkan untuk membeli obat memang masih bisa kita tunda dulu pembayarannya," tuturnya.

Artiyono mengaku, saat ini RSUD sudah tidak memiliki simpanan uang untuk operasional rumah sakit. "Simpanan terakhir kami sudah kami gunakan untuk membayar karyawan pada 20 Agustus kemarin, karena kita punya 600 karyawan non-PNS yang harus kita bayar secara pribadi," tuturnya.

Pihak manajemen RSUD selama ini sudah menyampaikan tagihan ke BPJS Kesehatan. Tapi hasilnya masih kosong. BPJS Kesehatan masih belum bisa membayar. "Alasannya sih memang masih

belum ada uang," ucapnya.

Ia berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Menurutnya pemerintah perlu menaikkan tarif pembayaran premi BPJS Kesehatan yang menurutnya sangat murah. Selain itu perlu adanya pembatasan kasus-kasus tertentu yang bisa mendapatkan jaminan BPJS. "Karena selama ini banyak orang-orang yang mampu juga mendapatkan BPJS, sedangkan mereka inilah yang sering menderita penyakit berbahaya dan anggaran perawatannya besar. Sementara orang-orang kurang mampu justru banyak yang sehat-sehat saja," jelasnya. (tbh/ton)